

POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
(Study Terhadap Faktor Penyebab dan Dampak Dalam
Kehidupan Keluarga)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Islam, Jurusan Peradila Agama, Pada Fakultas Syariah & Hukum UIN
Alauddin Makassar.

Oleh:

KURNIADI NUR
NIM :10100110022

FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara **Kurniadi Nur**, Nim: **10100110022**, mahasiswa Peradilan Agama Fakultas Syari'ah & Hukum, UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan Judul, "**POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA (Study Terhadap Faktor Penyebab Dan Dampak Bagi Kehidupan Keluarga)**" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di ajukan kesidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih Lanjut.

Makassar, 8 Desember 2014

Pembimbing I



Andi Intan Cahyani, M.Ag
NIP.197207192000032002

Pembimbing II



Drs. M. Tahir Maloko, M.HI
NIP. 196312311995031006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pandangan Para Pihak Terhadap Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa", yang disusun oleh Ahmad Mathar, NIM: 10100111005, Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan di pertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin tanggal 10 Maret 2015 M, bertepatan dengan 20 Jumadil Awal 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 10 Maret 2015 M.
20 Jumadil Awal 1436 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. H. Dr. Ali Parman, M.A	(.....)
Sekretaris	: Dr. Kasjim Salenda, SH., M. Th.I	(.....)
Munaqisy I	: Prof. H. Dr. Ali Parman, M.A	(.....)
Munaqisy II	: Drs. Hadi Daeng Mapuna, M. Ag	(.....)
Pembimbing I	: Andi Intan Cahyani, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Drs. M. Tahir Maloko, M.Hi	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Ali Parman M.A.
NIP. 19570414 198603 1 003

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling mulia diucapkan selain puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya yang senantiasa diberikan pada diri penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *“Poligami Di Pengadilan Agama Bulukumba (Study Terhadap Faktor Penyebab dan Dampak Bagi Kehidupan Keluarga).”*

Shalawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya.

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dalam penulisan ini, penulis mendasar pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Bulukumba.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak, baik secara spiritual maupun moril. Maka atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang tuaku yang saya cintai dan hormati Bapak Muhammad Nur S.Pd., dan Ibu Muliati S.Pd. yang tidak pernah putus doa demi kesuksesan belajar putranya dan telah memberikan seluruh cinta serta kasih sayangnya, dan juga yang telah memberikan dukungan lahir batin kepada penulis dalam proses studi selama ini. Bapak, Ibu, saya tidak akan mengecewakan Bapak,

Ibu, dan saya berjanji akan membahagiakanmu sampai akhir hayat. Insha Allah.

2. Rektor UIN Alauddin Makassar, Deka, Para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Segenap pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Peradilan Agama Bapak Dr. H. Halim Talli M.Ag, Sekretaris Jurusan Peradilan Agama Ibu A.Intan Cahyani, M.Ag, dan staf Jurusan Peradilan Agama yang telah membantu dan memberikan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan semua mata kuliah serta penulisan karya ilmiah ini.
4. Ibu Andi Intan Cahyani, M.Ag, dan Drs. M. Thahir Maloko, M.HI, sebagai Dosen Fakultas Syariah dan masing-masing selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan banyak pengetahuan terkait judul yang diangkat penulis.
5. Saudara-saudariku yang tersayang: kakak Riski Amalia Nur S.Pd M.Pd., yang selalu memberikan motivasi dan semangat disetiap langkahku.
6. Bapak Hakim Pembimbing di Pengadilan Agama Bulukumba yang telah memberikan fasilitas waktu, tempat, dan bantuannya selama penelitian, serta semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil yang tidak bisa penulis sebutkan satu demi satu hingga selesainya skripsi ini.
7. Teman-teman serta sahabat-sahabatku di Peradilan Agama, telah memberikan arti kebersamaan dan membantu selama perkuliahan sampai sekarang ini.
8. Teman Terdekatku Hasriani yang selama ini telah bersama-sama sejak perkuliahan sampai selesai penyusunan skripsi ini dan semoga persahabatan tetap utuh selamanya.

9. Teman-teman dan para sahabat yang jauh di mata namun dekat di hati, yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan kepada penulis.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Akhir kata penulis berharap kiranya tugas akhir ini dapat berguna bagi seluruh pembaca pada umumnya dan penulis pribadi pada khususnya.

Aamiin yaa Rabbal Alamin

Makassar, 27 November 2014

Penulis,

Kurniadi Nur

NIM. 10100110022



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-13
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Definisi Operasional.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	
A. Konsep Dasar Perkawinan	11
1. Pengertian Perkawinan.....	11
2. Prinsip dan Asas perkawinan	13
3. Dasar Hukum Perkawinan.....	15
4. Rukun dan Syarat perkawinan	18
5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	21
B. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami	25
1. Pengertian Poligami	25
2. Dasar Hukum Poligami	26
3. Tujuan Di Perbolehkannya Poligami	26
C. Poligami Menurut Para Ulama.....	29
1. Syarat-Syarat Poligami.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43

C. Sumber Data.....	43
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Instrumen Penelitian.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. Gambaran Umum Peradilan Agama	46
1. Kedudukan Pengadilan Agama.....	47
2. Susunan Organisasi Pengadilan Agama.....	48
3. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama.....	49
B. Latar Belakang dan Faktor Penyebab Poligami	54
C. Dampak Poligami Bagi Kehidupan Keluarga.....	63
BAB V P E N U T U P.....	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66-67

ABSTRAK

Nama : Kurniadi Nur

NIM : 10100110022

Jurusan : Peradilan Agama

**Judul : POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
(Studi faktor penyebab dan dampak bagi kehidupan keluarga)**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Poligami di Pengadilan Agama Bulukumba (study terhadap faktor penyebab dan dampak bagi kehidupan keluarga). Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus Poligami di Pengadilan agama bulukumba yang mengundang tanya, Jadi Rumusan Masalah yang di ambil dalam skripsi ini yaitu: Latar belakang seseorang melakukan Poligami dan Faktor penyebab dan dampak poligami bagi kehidupan keluarga.

Tujuan penulisan ini adalah untuk: Mengetahui latar belakang pelaku Poligami, dan Mengetahui dan menganalisis faktor penyebab dan dampak poligami bagi kehidupan keluarga.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan metodologi yaitu: Studi dokumen terhadap data yang ada di Pengadilan Agama Bulukumba, dan Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bulukumba, serta Analisis data yaitu penulis menggunakan analisis data kualitatif, yang mana penulis menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bulukumba sebagai tempat pelaku poligami melaksanakan proses pelaksanaan poligami di dapatka latarbelakang seseorang melakukan poligami yaitu latar belakang keluarga yang sudah turun temurun melakukan poligami, serta keadaan biologis laki-laki yang susah utuk dibendung, tentunya juga merujuk pada faktor penyebab yaitu keadaan istri yang tak mampu untuk melaksanakan atau memberikan kebutuhan jasmani maupun rohani yang tentunya memberikan dampak bagi kehidupan keluarga Misalnya Ketidak hamonisan hubungan atar keluarga.

Jadi, Penelitian ini hendaknya dapat menjadi motivasi bagi instansi yang terkait untuk lebih meningkatkan pelayanan secara professional terhadap orang islam yang mengajukan izin poligami.

Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban yang berlaku terutama hukum islam sehingga tercapailah masyarakat yang sadar akan kepentingan hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan wali seorang wanita atau yang mewakili mereka dan dibolehkan bagi laki-laki dan wanita bersenang-senang sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan.¹

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis dan batasan-batasan hubungan antara mereka. Tidak mungkin bagi seorang wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang laki-laki yang mendampinginya secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, harta melimpah ruah, atau intelektualitas yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang mendampinginya.²

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan terdapat dalam al-Qur'an dan hadis nabi. Kata *na-ka-ha* terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam QS an-Nisa'/4: 3

¹Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press 2002 M), hlm. 5.

² Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, hlm. 13.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ
وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Terjemahnya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila sila yang pertama ialah ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kekerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Pasal 1 dan penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut yang merupakan dan sekaligus dasar hukum perkawinan.⁴

³ Departemen Agama, RI., *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1998), hlm. 77.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press 2002 M), hlm. 5.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Sedangkan pasal 2 ayat (2) mengatur, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentulah orang-orang Islam melakukan perkawinan menurut hukum agamanya, seperti juga agama-agama lain. Tentang pencatatan perkawinan khusus untuk orang-orang Islam diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.⁵

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, ayat (2). Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁶

Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita. Mengawini wanita lebih dari seorang ini menurut hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang.⁷

Poligami dalam Islam telah diatur secara lengkap dan sempurna, tetapi jarang orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama, yaitu untuk menolong wanita. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami untuk

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2004), hlm. 2-3.

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 9-10.

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty 1989), hlm. 74.

mengikuti hawa nafsunya. Hal demikian sering sekali terjadi, khususnya di Indonesia. Karena itu, demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara jelas dan tegas. Islam membolehkan suami beristri lebih dari satu orang, dalam batas paling banyak empat orang, namun dengan syarat yang berat, tanpa persyaratan tersebut suami hanya dibolehkan beristri satu orang. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam QS. an-Nisa'/4:3. Ayat tersebut memberikan beberapa batasan. *Pertama:* batas maksimal empat orang istri dan *kedua:* hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil. Kalau syarat adil tidak terpenuhi dilarang melakukan kawin poligami. Keadilan yang dijadikan prasyarat untuk perkawinan poligami itu dinyatakan Allah secara umum, mencakup kewajiban yang bersifat materi dan juga kewajiban yang tidak bersifat materi. Ulama sepakat tentang keharusan adil dalam kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqah*. Ulama berbeda dalam menetapkan batas adil tersebut, apakah adil dalam arti sama banyak atau adil dalam arti berimbang.

Sebagian ulama memahami arti adil itu dengan adil dalam arti menyamakan *nafaqah* antara satu istri dengan yang lainnya secara kuantitatif. Dalam hal belanja harian (*nafaqah* dalam arti khusus) suami wajib menyamakan diantara istri-istrinya, karena itulah yang dimaksud dalam arti adil itu. Sebagian ulama berpendapat, bahwa selama suami telah memenuhi kewajiban *nafaqah* sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan istri, tidak harus dalam jumlah yang

sama banyak, karena masing-masing telah mendapatkan apa yang mencukupi bagi kebutuhannya.⁸

Demikian pula kewajiban adil dalam memberikan pakaian untuk istri-istrinya. Dalam penyediaan rumah tempat tinggal suami harus adil dalam pengertian tersebut di atas. Dia harus menyediakan sebuah tempat tinggal tersendiri bagi setiap istrinya. Dibolehkan suami menempatkan beberapa orang istri dalam satu rumah, kalau istri-istrinya itu sudah menyepakatinya hanya tidak boleh menempatkan mereka dalam satu tempat tidur.⁹

Ulama membatasi keadilan yang dijadikan Allah sebagai prasyarat kawin poligami itu pada keadilan dalam kesempatan bergaul diantara istri dengan istri yang lain. Kesamaan dan pembagian kesempatan bergaul di antara sesama istri itu dalam fiqh disebut dengan *qasm*, sedangkan yang dijadikan patokan pada kesempatan bergaul itu adalah malam hari, karena malam itulah waktu untuk bergaul antara suami istri menurut biasanya, sedangkan siang hari adalah waktu untuk mencari nafkah. Dengan demikian, secara sederhana *qasm* itu berarti giliran kesempatan bermalam.¹⁰

Sistem perundang-undangan di Indonesia khususnya tentang perkawinan, dalam hal ini adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut asas monogami, tetapi pelaksanaannya tidak mutlak dan bukan merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Undang-Undang itu masih mentolelir dan memberi kesempatan kepada laki-laki tertentu untuk

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Akasara 2004), hlm. 176-177.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 177-178.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 178-179.

memiliki isteri lebih dari satu (berpoligami) dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang dikemukakan dalam undang-undang dalam berpoligami memang dirasa cukup berat, harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, jika tanpa adanya izin dari pengadilan agama, maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.¹¹

Angka kawin cerai yang tinggi di Kabupaten Bulukumba disebabkan faktor kemudahan dalam melakukan pernikahan, sehingga poligami banyak dilakukan oleh masyarakat Bulukumba. Perkawinan, Perceraian, dan Poligami banyak yang tidak terdaftar di Pengadilan Agama. Salah satu faktor penyebabnya karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur dan tata cara untuk mendaftarkan perkawinan atau perceraian bahkan izin Poligami di Pengadilan, namun fokus penelitian penyusun hanya meneliti izin poligami di Pengadilan Agama Bulukumba.

Latar belakang pelaku poligami sangatlah menarik untuk di ketahui dan faktor-faktor yang mengiakan orang melakukan poligami, dengan banyaknya kasus poligami yang terjadi atau diputuskan di pengadilan Agam Bulukumba.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai Faktor penyebab Poligami di Pengadilan Agama Bulukumba dan dampak terhadap kehidupan keluarga.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56 ayat (3).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka pokok masalah yang dibahas adalah:

1. Apa yang melatar belakangi seseorang melakukan Poligami?
2. Bagaimana faktor penyebab dan dampak Poligami bagi kehidupan keluarga?

D. Definisi Operasional

Poligami”, berasal dari bahasa Yunani. Poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu wanita atau perkawinan yang banyak atau pemahaman tentang seorang laki-laki yang membagi kasih sayangnya atau cintanya dengan beberapa wanita dengan menyunting atau menikahi wanita lebih dari satu dan hal ini dapat mengundang persepsi setiap orang baik negatif atau positif tentang baik buruknya moral seseorang yang melakukan poligami.¹².

Sedangkan pengertian Pengadilan Agama tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, yang berbunyi:

“*Pengadilan Agama* (sebagai salah satu badan penyelenggara kekuasaan kehakiman) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama

¹² Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia* (Surabaya: Reality Publisher, 2008), hlm. 374

Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah".

E. Kajian Pustaka

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun referensi – referensi yang penulis maksud adalah diantaranya:

1. Pedoman Kerja Hakim, Panitera, dan Jurusita sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar oleh Mahkamah Agung RI. Buku ini memuat mengenai proses perkara. mulai dari pendaftaran sampai pada tingkat putusan dan disertai contoh-contoh formulir yang ada pada administrasi pengadilan Agama.
2. Urgensi dan Fungsi Administrasi Peradilan oleh A. Mukti Arto yang disampaikan pada sosialisasi bimbingan Teknis Administrasi Peradilan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi yang sangat penting bagi proses administrasi.
3. Implementasi Sipp/Cts Dan Siadpa Berbasis It "Menyambut Matahari Terbit Di Januari 2014" oleh Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH. Membahas mengenai dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima demi tercapainya *good governance*.

4. Dr. H. Amir Nuruddin, MA., dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Islam Di Indonesia, dalam buku ini telah diuraikan mengenai permohonan Poligami.

Sejauh pengamatan penulis, judul ini belum pernah di bahas oleh siapa pun dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi. Dengan demikian, tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan obyektivitasnya juga diharapkan menjadi cakrawala baru dalam kajian tentang Latar Belakang Pelaku Poligami Di Pengadilan Bulukumba.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui Latar Belakang Seseorang Melakukan Poligami di Pengadilan Agama Bulukumba.
2. Untuk mengetahui Faktor Penyebab dan Dampak Poligami di dalam Kehidupan Rumah tangga.

Tujuan khusus

1. Untuk mendapatkan data mengenai Latar Belakang Seseorang Melakukan Poligami di Pengadilan Agama Bulukumba.
2. Untuk mendapatkan data Mengenai Faktor Penyebab dan Dampak Poligami di dalam Kehidupan Rumah tangga.

Kegunaan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Segi praktis.

- a. Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan bagi masyarakat luas dalam hal Latar Belakang Dan Dampak Poligami bagi Kehidupan Keluarga dan peraturan yang mengaturnya, sekaligus dapat mengetahui tata cara penerapannya pada Pengadilan Agama dan akibat hukumnya.
 - b. Dapat menjadi masukan bagi dunia Peradilan dalam penyelesaian perkara Poligami.
2. Segi Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata. Di samping itu menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Dasar Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Mengenai pengertian perkawinan terdapat beberapa pendapat yang satu dengan lainnya berbeda, tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain, perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyak unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain, mereka membatasi banyak unsur yang masuk dalam perumusan pengertian perkawinan namun akan menjelaskan unsur-unsur yang lain dalam tujuan perkawinan.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹

Perkawinan dalam arti aqad adalah merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII 1977), hlm. 10.

keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.²

Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku kepada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, karena itu perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melahirkan, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³

Kata nikah dari uraian di atas berarti akad. Arti “akad” menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis, dan penggunaan ungkapan “membolehkan/menghalalkan hubungan kelamin” karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara’. Diantara yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah diantara keduanya.

Adapun rumusan pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Di samping pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengertian rumusan lain yang tidak mengurangi arti pengertian Undang-Undang tersebut namun bersifat

²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 9.

³Moh. Thalib, *Fiqih Sunnah*, Jilid VII (Cet. II; Bandung: Al-Ma’arif, 1990), hlm. 9.

⁴Departemen Agama RI, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta:1996), hlm. 3.

menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut: Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah: “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Undang-Undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama, dan oleh karena itu bagi orang yang melaksanakannya telah melakukan ibadah.

2. Prinsip dan Asas Perkawinan

Dalam uraian prinsip dan asas perkawinan ini, tentunya tidak terlepas dari apa yang telah diatur dalam agama Islam yakni menurut hukum Islam yaitu:

- a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Dengan cara dilakukan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui kedua belah pihak setuju atau tidak.
- b. Tidak semua perempuan dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan-ketentuan tentang larangan perkawinan antara perempuan dan pria yang harus diindahkan.

⁵Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 14.

- c. Perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tenteram, damai, dan kekal selama-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.⁶

Sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan dijelaskan prinsip-prinsip atau asas perkawinan yang disebutkan dalam penjelasan umumnya yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, dan dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang hal itu bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

⁶Syaikh Husain bin Audah Al-Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jilid III (Jakarta, Pustaka Imam As-Syafi'i), hlm. 6.

- d. Bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, maka Undang-Undang menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun bagi wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- e. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Maka Undang-Undang menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.⁷

Dari uraian prinsip dan asas dalam perkawinan baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-Undang perkawinan dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil.

3. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang diwajibkan kepada setiap umat Islam pria maupun wanita yang telah memiliki kemampuan dan syarat untuk itu. Karenanya apabila seorang dipandang mampu dan memiliki syarat-syarat yang ditentukan oleh agama maka mereka diharuskan untuk melakukan pernikahan (menikah) secara sah menurut agama. Hidup membujang termasuk pelanggaran atas naluri manusia.⁸

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, hlm. 34.

⁸Abdurrahman, *Syariah The Islamic Law*, Diterjemahkan Oleh H. Basrilba Asqhary, dengan Judul; *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Renika Cipta, 1992), hlm. 11.

Islam menganjurkan ummatnya untuk menikah, dan anjuran ini diungkapkan dalam beberapa redaksi yang berbeda. Misalnya, Islam menyatakan bahwa menikah adalah petunjuk Para Nabi dan Rasul, sementara merekalah sosok-sosok teladan yang wajib kita ikuti.⁹

Allah SWT berfirman dalam QS Ar-Rad/13:38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِغَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
 اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah, bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu). (QS. Ar-Rad:38)¹⁰

Selain itu, Islam juga menyebutkan bahwa pernikahan adalah sebuah anugerah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nahl/16:72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ
 الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah. (QS. An-Nahl:72)¹¹

Islam juga menyebut pernikahan sebagai salah satu tanda kebesaran Allah SWT. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Ar-Rum/30:21.

⁹Syaikh Husain bin Audah Al-Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, hlm. 2.

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, Toha Putra). hlm. 376.

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 412.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum:21)¹²

Tidak sedikit orang yang masih bimbang untuk menikah. Akibatnya ia urung menikah karena takut menanggung biaya pernikahan dan memikul tanggung jawab yang menjadi konsekuensi dari pernikahan tersebut. Maka dari itu Islam datang untuk mengubah pola pikir mereka. Allah menjadikan pernikahan sebagai jalan untuk memperoleh kekayaan, dan Allah akan memberikan kekuatan kepada orang yang menikah sehingga ia mampu mengatasi sebab-sebab kefakiran.¹³

Allah SWT berfirman dalam QS An-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur:32)¹⁴

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 644.

¹³Syaikh Husain bin Audah Al-Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, hlm. 2.

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 549.

Rasulullah saw bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: tiga golongan yang pasti akan Allah bantu yaitu: orang yang berjihad di jalan Allah, budak mukatab yang ingin melunasi dirinya, dan orang yang menikah untuk menjaga kesucian dirinya.¹⁵

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum, kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah atau tidak lengkap. Keduanya mempunyai arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya, syarat ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun, dan adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menetapkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan,

¹⁵Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, (*Shahih Sunanut Tirmidzi* [no. 1352]), Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 2041]), dan An-Nasa'i (*Shahih Sunanun Nasa'i* [no. 3017]).

calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau maskawin.

Unsur pokok yang harus ada pada suatu perkawinan seperti tersebut di atas, maka rukun perkawinan secara lengkap adalah:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali calon pengantin perempuan, dan qabul yang dilakukan oleh suami atau calon pengantin laki-laki.¹⁶

Adapun syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk integral dari suatu ibadah ataupun mu'amalah.

Unsur pokok yang harus ada pada suatu perkawinan menurut Imam Hanafi, maka rukun perkawinan secara lengkap adalah:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shighat (ijab dan qobul)¹⁷

Unsur pokok yang harus ada pada suatu perkawinan Menurut Imam Maliki, maka rukun perkawinan secara lengkap adalah:

- a. Calon mempelai laki-laki

¹⁶Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 14, hlm. 18.

¹⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 8.

- b. Calon mempelai Perempuan
- c. Mahar
- d. Wali
- e. Dua orang saksi
- f. Shighat (ijab dan qobul) ¹⁸

Adapun syarat adalah yang harus ada, karena syarat itu berkaitan dengan rukun, dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Sehingga syarat-syarat perkawinan bagi:

- a. Calon mempelai laki-laki, yaitu: bukan mahram dari calon istri, balig, cukup umur, waras akalnya, adil, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), orangnya jelas, dan tidak sedang melaksanakan ihram.
- b. Calon mempelai perempuan, yaitu: tidak ada halangan syara' yakni tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, cukup umur, waras akalnya, merdeka atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang berihram.
- c. Wali dari calon mempelai perempuan, yaitu: laki-laki, Islam, balig, waras akalnya, adil, dan tidak sedang ihram haji.
- d. Dua orang saksi, yaitu: laki-laki, balig, Islam, adil, waras akalnya, dapat mendengar dan melihat, dan memahami bahasa yang digunakan dalam ijab kabul.
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali perempuan, dan kabul yang diucapkan oleh calon suami, yaitu: akad harus dimuali dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Materi ijab kabul tidak boleh berbeda seperti nama perempuan secara lengkap dan bentuk maharnya disebutkan. Ijab kabul tidak boleh dengan

¹⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 8.

menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi berlangsungnya perkawinan dan diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.¹⁹

Undang-Undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan, hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqhi seperti uraian di atas dan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.²⁰

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin ada beberapa tujuan yang disyariatkan perkawinan yaitu pertama untuk mendapat anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Kedua untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan penuh rasa kasih sayang.²¹

Dalam Undang-Undang perkawinan, rumusan tujuan perkawinan adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam rumusan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

¹⁹Syaikh Husain bin Audah Al-Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, hlm. 36.

²⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 12.

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 46.

Dari rumusan-rumusan tujuan perkawinan di atas penulis dapat merinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Memperoleh keturunan yang sah.
- c. Mewujudkan suatu keluarga yang bahagia penuh ketenangan dengan dasar cinta kasih.

Imam Ghazali, membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah kehidupan manusia.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.²²

Dalam hal ini untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan satu demi satu dari kelima tujuan perkawinan tersebut di atas:

- a. Untuk memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia yang mengandung dua segi kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan umum, setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan/anak. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupan mereka

²²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 13.

terasa sepi, walaupun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, berkedudukan tinggi, namun jika tidak mempunyai keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Sedangkan aspek yang umum yang berhubungan dengan keturunan/anak ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan akan selalu berkembang dan memakmurkan alam.

- b. Untuk memenuhi tuntutan naluriyah/hajat tabiat kemanusiaan. Tuhan menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan serta sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dilihat dari sudut biologis daya tarik itu ialah kebirahian atau seksuil. Sifat kebirahian yang biasanya didapati pada diri manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah merupakan tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Andaikata tidak ada saluran yang sah itu maka manusia banyak manusia yang melakukan perbuatan yang tidak baik dalam masyarakat. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja maka keadaan manusia saat itu tak ubahnya seperti hewan dan dengan sendirinya masyarakat akan menjadi kacau.
- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu dan seksuil. Dan tidak ada saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksuilnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun

perempuan akan mencari jalan yang tidak halal. Pengaruh hawa nafsu itu adalah sedemikian besarnya sehingga kadang-kadang manusia sampai lupa untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia memang diciptakan dalam keadaan lemah, kelemahan dalam mengendalikan hawa nafsu, apabila melihat atau berhadapan dengan lawan jenisnya, karena menyadari bahwa manusia itu bersifat lemah dalam mengendalikan hawa nafsu kebirahian maka untuk menghindari pemuasan dengan cara tidak sah yang pada akhirnya banyak mendatangkan kerusakan dan kejahatan, dan satu-satunya jalan ialah melakukan perkawinan.

- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat. Mengapa hal itu bisa terjadi, kita semua mengetahui bahwa pada umumnya antara laki-laki dan wanita sebelum melaksanakan perkawinan pada umumnya tidak ada ikatan apapun. Satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbal balik. Di atas dasar cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga tersebut lahirlah anak-anak kemudian bertambah luas menjadi rumpun keluarga demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar.
- e. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab sebelum melakukan perkawinan pada umumnya pemuda maupun pemudi tidak memikirkan soal penghidupan,

karena segala keperluan masih ditanggung oleh orang tua, setelah berumah tangga mulai menyadari akan tanggungjawab di dalam mengemudi rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga mulai memikirkan bagaimana cara mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya si istri juga berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangga. Hal ini mengakibatkan bertambahnya aktifitas kedua belah pihak, si suami bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki sedang si istri lebih giat berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan rumah tangga yang damai dan bahagia.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

1. Pengertian Poligami

Secara *etimologis*, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani gabungan dari dua kata yakni *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Kata lain yang mirip dengan poligami adalah poligini yang juga berasal dari bahasa Yunani gabungan dari dua kata *polus* yang berarti banyak dan *gene* yang berarti perempuan. Dari pengertian secara *etimologis* tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami dan poligini secara *terminologis* adalah salah satu sistem perkawinan dengan ciri salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan. Artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai istrinya. Orang yang melakukan poligami disebut. *poligam*. Selain poligami juga dikenal istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (istri) memiliki

lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.²³ Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu seperti pada suku Tuda dan pada beberapa suku Tibet.²⁴ Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqh poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak istri. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga atau empat kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi kebolehan mengawini tersebut maksimal hanya pada empat wanita.²⁵

2. Dasar Hukum Poligami

Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s. beristrikan Siti Hajar di samping Siti Sarah dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim a.s. Dalil naqli yang dijadikan landasan kebolehan poligami di sebagian kalangan umat Islam dari QS An- nisa'/4:3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



²³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), hlm. 693

²⁴Quraish Shihab, *Perempuan, dari Cinta sampai Selesai Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah*, (Jakarta : Lentera, 2005), hlm. 156.

²⁵Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang- undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 16.

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.²⁶

Ayat tersebut diturunkan pada tahun 5 H. atau bertepatan dengan tahun 625 M. Ketika itu Rasulullah SAW dan umat Islam mengalami masa yang cukup sulit, yakni kekalahan dalam perang Uhud. Pada peperangan sebelumnya, yakni perang Badar, Rasulullah SAW dan umat Islam mengalami kemenangan yang gemilang walaupun balatentaranya lebih sedikit jumlahnya dibandingkan jumlah balatentara kaum musyrikin Mekah. Namun, kemenangan dalam perang Badar tidak diperoleh lagi pada perang Uhud (13 tahun kemudian), padahal dalam perang ini jumlah balatentara Islam lebih banyak daripada perang sebelumnya. Dalam perang tersebut banyak para sahabat yang mati syahid dan meninggalkan janda-janda dan anak-anak yatim yang perlu pemeliharaan. Ayat tersebut diturunkan sebagai petunjuk dan tuntunan terhadap kebolehan berpoligami.

3. Tujuan Diperbolehkannya Poligami

Sebagaimana keterangan di atas bahwa ayat poligami diturunkan setelah kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Dalam perang tersebut banyak sahabat yang gugur dan mati syahid. Mereka meninggalkan anak-anak yatim yang masih membutuhkan belaian kasih sayang dan pemeliharaan dari orang tua yang menjamin kehidupannya. Demikian pula mereka

²⁶ Departemen Agama, RI., *Alqur'an dan Terjemahnya*, hlm. 77

meninggalkan janda-janda yang merasa kesulitan menanggung biaya hidup mereka sendiri dan pemeliharaan terhadap anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh suami mereka. Perkawinan menjadi salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan poligami. Dalam hal ini al-Qur'an telah memberi tuntunan dan petunjuk, sehingga mereka (anak-anak yatim) tidak menjadi terlantar.²⁷

Tujuan poligami dapat dilihat pada praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menikahi wanita-wanita (para janda) tidak hanya bertujuan memenuhi hasrat biologis semata, melainkan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi istrinya. Kalau Rasulullah SAW seorang yang tamak dan rakus terhadap perempuan maka beliau tentu tidak akan menikahi perempuan-perempuan yang kebanyakan sudah janda bahkan sudah berumur yang tidak muda lagi serta tidak menguntungkan secara ekonomi.²⁸

Selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah menikahi perempuan yang masih berstatus gadis (perawan) selain Aisyah, yang dinikahkan pada usia muda belia. Semua istri Rasulullah SAW, selain Aisyah sudah berstatus janda dan sebagian membawa anak-anak yatim. Beliau berpoligami setelah istri pertama, yaitu Khadijah wafat dalam usia 60 tahun.²⁹

²⁷ Labib MZ, *Rahasia Poligami Rasulullah*, (Gresik : Bintang Pelajar, 1986), hlm. 51.

²⁸ M. Alfatih Suryadilaga, "Sejarah Poligami dalam Islam", *Musawa Jurnal Islam dan Gender* Vol. I, No. 1, Maret 2002, hlm .2..

²⁹ Labib MZ, *Rahasia Poligami Rasulullah*, hlm. 110.

C. Poligami Menurut Para Ulama

Menurut Musdah Mulia, dosen pasca sarjana UIN syarif Hidayatullah, “Poligami itu haram lighairih, yaitu haram karena adanya dampak buruk dan ekses-ekses yang ditimbulkannya, ia juga mengaku memiliki data yang menunjukkan bahwa praktik poligami di masyarakat telah menimbulkan masalah yang sangat krusial dan problem sosial yang sangat besar. Begitu juga dengan tingginya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), keretakan rumah tangga dan penelantaran anak-anak.”³⁰

Quraish Shibab menyatakan, “Poligami itu mirip dengan pintu darurat darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan emergency tertentu.”³¹

KH. Miftah Faridh (Direktur PUSDAI Jabar), juga memiliki pandangan yang sama, “Poligami dalam pandangan Islam merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah sosial yang dihadapi manusia. Poligami tidak perlu dipertentangkan, apalagi sampai menimbulkan keretakan ukhuwah Islamiyah, adapun jika ada yang belum siap melakukannya, itu lain persoalan.”³²

Direktur utama Pusat Konsultasi Syariah, Surahman Hidayat, mengatakan, “Nikah itu baik poligami atau monogamy, tidak untuk menzalimi siapa pun.

³⁰Musdah Mulia, *Allah Melihat Taqwa Bukan Orientasi Seksual Manusia*, Dalam jurna Edisi Maret 2008.

³¹Quraish Shihab, *Perempuan, dari Cinta sampai Selesai Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah*, hlm. 219.

³²KH. Miftah Faridh, *Dalam Dialog, Perkawinan Dalam Konsep Islam*, 2010.

Justru untuk tegaknya kebahagiaan, yang pada gilirannya terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah warahman.”³³

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, menunjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang sudah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak ada keadilan di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.³⁴

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendatipun tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang isteri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil di antara para isteri. Syarat-syarat ini ditemukan di dalam dua ayat poligami, yaitu Qs an-Nisa’/4:3,129

Penafsiran Asghar, sebenarnya dua ayat di atas menjelaskan betapa al-Qur’an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada maka al-Qur’an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang istri, dengan syarat harus adil. Dengan mengutip al-Tabari, menurut Asghar, inti ayat di atas sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka.³⁵

³³Surahman Hidayat, *Islam menggugat Poligami*, (Jakarta, Gramedia, 2011), hlm. 22

³⁴Asghar Ali Enginerr, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm. 111.

³⁵Asghar Ali Enginerr, *Pembebasan Perempuan*, hlm. 112-113.

Berbeda dalam pandangan fikih, poligami yang di dalam kitab-kitab fikih disebut dengan *ta'addud al-zawjat*, sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan, bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani menyatakan laki-laki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. As-Syafi'i juga mensyaratkan keadilan diantara para istri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari.³⁶

Pandangan al-Qur'an yang selanjutnya di adopsi oleh ulama-ulama fikih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami. *Pertama*, seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. *Kedua*, seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan dan hak-hak lain. Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat *fuqaha*, setidaknya ada delapan keadaan.

1. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
2. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tidak dapat melahirkan.
3. Istri sakit ingatan.
4. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri.

³⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 158.

5. Istri memiliki sifat buruk.
6. Istri minggat dari rumah.
7. Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang.
8. Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan kemadaraman di dalam kehidupan dan pekerjaannya.³⁷

Al-Jurjani dalam kitabnya, *Hikmah at-Tasyrî' wa Falsafatuhu* menjelaskan ada empat hikmah yang dikandung oleh syari'at poligami.

1. Kebolehan poligami yang dibatasi sampai empat orang menunjukkan bahwa manusia sebenarnya terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Jadi menurutnya, sangatlah pantas laki-laki itu beristri empat.
2. Batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki, pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri.
3. Seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.³⁸

Al-Aṭar dalam bukunya *Ta'addud az-Zawzāt* mencatat empat dampak negatif poligami.

1. Poligami dapat menimbulkan kecemburuan di antara para istri.
2. Poligami menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau suami tidak bisa bersikap bijaksana dan adil.

³⁷Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 100.

³⁸Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, hlm. 109.

3. Anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan untuk terjadinya perkelahian, permusuhan dan saling cemburu.
4. Kekacauan dalam bidang ekonomi, bisa saja pada awalnya suami memiliki kemampuan untuk poligami, namun bukan mustahil suatu saat akan mengalami kebangkrutan, maka yang akan menjadi korban akan lebih banyak.³⁹

Undang-undang Perdata menganut asas monogami seperti yang terdapat di dalam Pasal 3 yang menyatakan, Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Kebolehan poligami di dalam Undang-undang Perdata sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.⁴⁰

Pasal 4 Undang-undang Perdata dinyatakan seorang suami yang membolehkan untuk berpoligami dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa yahya harapan, monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*), di samping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan). Oleh

³⁹Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, hlm. 111.

⁴⁰Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm. 60.

sebab itu pada Pasal 3 ayat 2 ada pernyataan: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁴¹

Ayat ini jelas sekali bahwa Undang-undang Perdata telah melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seorang, sesuatu yang tidak ada preseden historisnya di dalam kitab-kitab fikih. Penjelasan Pasal 3 ayat 2 tersebut dinyatakan: Pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami. Berkenaan dengan Pasal 4 di atas, setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami.

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (menurut dokter).
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴²

Syarat-syarat dalam poligami yang di tentukan dalam syariat Islam tidaklah menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak di wajibkan kepada pihak keluarga wanita untuk memaksa anaknya kawin dengan laki-laki yang telah mempunyai istri satu atau lebih. Dan menurut syariat Islam memberikan hak kepada wanita dan keluargnya untuk menerima poligami

⁴¹Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahi Trading Co Medan, 1975), hlm. 25-26.

⁴²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, hlm. 163.

jika ada manfaat dan maslahat bagi putri mereka berhak menolak jika di khawatirkan sebaliknya.

1. Syarat-syarat Poligami

Beberapa ulama setelah meninjau ayat-ayat tentang poligami, mereka menetapkan bahwa menurut asalnya, Islam sebenarnya adalah monogami (menikah dengan seorang saja). Terdapat ayat yang mengandung peringatan agar tidak disalah gunakan. Ini semua bertujuan supaya tidak terjadi kezaliman. Tetapi, poligami diperbolehkan dengan syarat ia dilakukan pada masa-masa terdesak untuk mengatasi perkara yang tidak dapat diatasi dengan jalan lain. Atau dengan kata lain bahwa poligami itu diperbolehkan oleh Islam dan tidak dilarang kecuali jikalau dikhawatirkan bahwa kebaikannya akan dikalahkan oleh keburukannya.

Sebagaimana talaq, begitu jugalah dengan poligami yang diperbolehkan umatnya berpoligami berdasarkan nas-nas syariat serta realita keadaan masyarakat. Ini berarti poligami tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya demi untuk menjaga ketinggian budi pekerti dan nilai kaum muslimin.

Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki akan berpoligami hendaklah dia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Membatasi jumlah istri yang akan dinikahinya.

Syarat ini telah disebutkan oleh Allah SWT dengan firman-Nya:

“Maka menikahlah dengan siapa yang kamu inginkan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga, atau empat.”(QS. An-Nisa’/ 4:3)

Ayat diatas menerangkan dengan jelas bahwa Allah telah menetapkan seseorang itu menikah tidak boleh lebih dari empat orang istri. Jadi, Islam membatasi kalau tidak beristri satu, boleh dua,tiga, atau empat saja.⁴³

b. Disyaratkan berlaku adil,

Seperti dalam QS An Nisa'/4:3 dengan tegas diterangkan dan dituntut agar para suami bersikap adil jika akan berpoligami. Andaikan takut tidak dapat berlaku adil kalau sampai empat orang istri, maka hendaklah menikah dengan seorang saja.

Para mufassir berpendapat bahwa berlaku adil itu wajib. Adil di sini bukanlah berarti hanya adil terhadap para istri saja, tetapi mengandung arti berlaku adil secara mutlak. Oleh kerana itu seorang suami hendaklah berlaku adil sebagai berikut:

a) Berlaku adil terhadap diri sendiri

Seorang suami yang selalu sakit-sakitan dan mengalami kesukaran untuk bekerja mencari rezeki, sudah tentu tidak akan dapat memelihara beberapa orang isteri. Apabila dia tetap berpoligami, ini berarti dia telah menganiayai dirinya sendiri. Sikap yang demikian adalah tidak adil.⁴⁴

b) Adil diantara para istri

Adil diantara istri-istri ini hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah dalam QS.An-Nisa'/4:3. Namun, berlandung pada pernyataan itu pada

⁴³Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, hlm. 114.

⁴⁴Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, hlm. 116.

kenyataannya, sebagaimana yang ditegaskan Al Quran, berlaku adil sangat sulit dilakukan (An-Nisa'/4:129)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Terjemahnya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁵

Berdasarkan kedua ayat tersebut di atas dapat di pahami bahwa suami dapat berlaku adil:

1. Adil memberi nafkah

Dalam hal suami memberikan nafkah, hendaklah suami tidak mengurangi nafkah dari salah seorang istrinya. Memeberi nafkah lebih kepada seorang istri dari yang lain diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu. Prinsip adil ini tidak ada perbedaan diantara para istri. Kesemuanya mempunyai hak yang sama sebagai seorang istri.

2. Adil dalam menyediakan tempat tinggal

Para ulama sepakat mengatakan bahwa suami bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal yang tersendiri untuk tiap-tiap istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan suami. Ini semua dilakukan semata-mata untuk menjaga kesejahteraan mereka.

⁴⁵Departemen Agama, RI., *Alqur'an dan Terjemahnya*, hlm. 77

3. Adil dalam giliran

Istri berhak mendapatkan giliran suaminya di rumahnya sama lamanya dengan waktu menginap di rumah istri-istri yang lain. Sekurang-kurangnya suami harus menginap di rumah seorang istri satu malam suntuk tidak boleh kurang. Begitu juga dengan istri-istri yang lain. Walaupun ada istri yang sedang haidh, nifas, ataupun sakit, suami wajib adil dalam soal ini. Karena, tujuan pernikahan dalam Islam bukanlah semata-mata untuk memenuhi nafsu, tetapi bertujuan untuk menyempurnakan kasih sayang dan kerukunan antara suami dan istri. Hal ini diterangkan dalam firman Allah SWT QS. Ar-Ruum'/30:21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴⁶

Andaikan suami tidak bisa bersikap adil, maka Ia akan berdosa dan akan mendapatkan siksaan dari Allah SWT pada hari kiamat dengan tanda-tanda pinggangnya miring. Hal ini disaksikan oleh seluruh umat manusia sejak Nabi Adam sampai ke anak cucunya. Allah berfirman dalam QS. Az-Zalzalah'/99:7,8

⁴⁶Departemen Agama, RI., *Alqur'an dan Terjemahnya*, hlm. 599

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٦٥﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.⁴⁷

c) Anak-anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan,

pemeliharaan serta kasih sayang yang adil dari seorang ayah.⁴⁸

c. Tidak menimbulkan mudharat bagi istri maupun anak.

Suami harus yakin bahwa pernikahannya yang baru tidak akan merugikan kehidupan istri serta anak-anaknya. Karena, diperbolehkan poligami dalam Islam adalah untuk menjaga kepentingan semua pihak. Jika kepentingan ini tidak dapat dijaga dengan baik, maka seseorang yang berpoligami pada saat itu adalah berdosa.

d. Mampu menafkahi (nafkah lahir),

Rasulullah memberikan pesan pada setiap laki-laki yang mampu untuk menafkahi (mandiri) untuk menikah, Sebagaimana sabda Rasulullah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَ مَفْلَيْتَزَوَّجٍ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah mampu kawin (menafkahi), maka kawinlah. Karena dia itu dapat

⁴⁷Departemen Agama, RI., *Alqur'an dan Terjemahnya*, hlm. 404

⁴⁸Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, hlm. 111.

menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan (HR. Bukhari Muslim)⁴⁹

Hadis di atas menunjukkan bahawa Rasulullah (s.a.w.) menyuruh setiap kaum laki-laki supaya menika, tetapi dengan syarat sanggup mengeluarkan nafkah kepada istrinya. Andaikan mereka tidak berkemampuan, maka tidak disarankan menikah walaupun dia seorang yang sehat lahir serta batinnya. Oleh karena itu, untuk menahan nafsunya, dianjurkan agar berpuasa. Jadi, kalau seorang istri saja sudah kepayahan untuk memberi nafkah, sudah tentulah Islam melarang orang yang demikian itu berpoligami. Memberi nafkah kepada istri adalah wajib berlakunya suatu pernikahan, ketika suami telah memiliki istri secara mutlak. Begitu juga si istri wajib mematuhi serta memberikan semuanya yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan dari kemampuan zahir atau lahir ialah :

1. Mampu memberi nafkah seperti pakaian dan makan minum
2. Mampu menyediakan tempat tinggal yang wajar
3. Mampu menyediakan kemudahan yang wajar seperti pendidikan.
4. Sehat tubuh badannya dan tidak berpenyakit yang bisa menyebabkan Ia gagal dalam memenuhi tuntutan zahir yang lain.
5. Mempunyai kemampuan dalam hubungan suami istri.⁵⁰

⁴⁹Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, (*Shahih Sunanut Tirmidzi* [no. 1352]), Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 2041]), dan An-Nasa'i (*Shahih Sunanun Nasa'i* [no. 3176]).

⁵⁰Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, hlm. 122.

Adapun syarat-syarat poligami menurut hukum positif adalah sebagai berikut:

1. Harus izin dari pengadilan.
2. Bila dikehendaki dari orang yang bersangkutan
3. Hukum dan Agama yang bersangkutan mengizinkannya tidak ada halangan dalam hal ini.⁵¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur juga tentang poligami yang antara lain disebutkan, bahwa berpoligami hanya dibatasi dengan empat orang isteri.

Hal ini seorang suami yang beristri lebih dari seorang, maka harus mendapatkan izin dari pengadilan dan harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang disertai beberapa alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Sebenarnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk dibenarkan berpoligami menurut hukum positif di Indonesia dapat disignifikasikan menjadi:

- a. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- b. Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan agama.⁵²

⁵¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 77.

⁵² Departemen Agama, RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 34.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan fokus kajian pendekatan Yuridis-Empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis, adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan, sedangkan metode pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran, Sehingga yang dimaksud dengan Yuridis-Empiris, adalah suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktek yang dijalankan oleh Pengadilan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bulukumba. Khususnya pada wilayah kerja Pengadilan Agama Bulukumba dalam kaitannya dengan penerapan Faktor Penyebab dan dampak Poligami.

Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah dikarenakan pada Pengadilan Agama Bulukumba memiliki Keberagaman Faktor dan dampak poligami, walaupun setiap tahunnya kurang banyak yang melakukan poligami tetapi menarik untuk kita ketahui.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dalam disiplin ilmu hukum meneliti data-data primer. Data-data primer diperoleh melalui beberapa cara yaitu wawancara, observasi, dan penelitian-penelitian eksperimental.

Dalam hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pada taraf implementasinya dalam praktik di lapangan dimana dilakukan dengan menggunakan teknik observasi (pengalaman), pengamatan, dan wawancara, dan data-data yang diperoleh tersebut kemudian diperbandingkan, sehingga kesimpulan yang ditarik benar-benar merefleksikan tujuan dan manfaat penelitian ini.

C. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut:

1. Data primer, berupa data-data didapatkan dalam penelitian di lapangan, yaitu data yang diperoleh dan bersumber secara langsung dari responden melalui wawancara yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang dipergunakan untuk melengkapi data primer yang sekaligus sebagai data pendukung karena mempunyai daya mengikat. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup semua data yang diperoleh dan bersumber dari keseluruhan bahan-bahan kepustakaan termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan, literatur-literatur ilmiah, dan artikel-artikel, maupun makalah-makalah hukum yang dimuat dalam berbagai media cetak untuk dipergunakan sebagai acuan teori dalam pembahasan lebih lanjut.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menjaring data yang diperlukan, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bulukumba. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode interview (wawancara). Wawancara adalah tanya jawab dengan orang yang diperlukan untuk dimintai keterangan mengenai suatu hal.¹

Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan judul yang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrument dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, karena data yang diperoleh adalah data deskriptif yang sulit diukur dengan angka-angka, yaitu apa yang telah dinyatakan secara lisan atau tertulis juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh yang terutama bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala-gejala yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data dan materi yang disajikan, dipergunakan beberapa metode:

¹ G Setia Nugraha, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Sulita Jaya, 2013), hlm. 634.

1. Deskriptif pada umumnya dipergunakan dalam menguraikan, mengutip, atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.
2. Komperatif pada umumnya dipergunakan dalam membandingkan perbedaan-perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan kerancuan.
3. Deduktif dan induktif. Deduktif tolak ukurnya adalah peraturan perundang-undangan dan syariat Islam, sedangkan induktif adalah dalam menyusun logika untuk mengambil kesimpulan.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Peradilan Agama

Peradilan Agama sesungguhnya telah lama hadir dalam kehidupan hukum di Indonesia, yaitu sejak agama Islam masuk dan dikenal serta diterima di wilayah nusantara. Ketika pemerintah Belanda menjajah kepulauan nusantara, pengaturan dan pengakuan mengenai kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama terdapat dalam berbagai peraturan, sehingga terdapat pula keragaman nama dan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Peradilan Agama di Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka dalam UUD 1945, keberadaannya diakui dan termasuk dalam lingkungan Badan Kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 24, namun belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus struktur organisasi, kekuasaan, dan hukum acara dalam lingkungan Peradilan Agama. Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 jo Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, secara formal keberadaan Pengadilan Agama diakui, namun mengenai susunan dan kekuasaan (wewenangnya) masih juga beragam dan hukum acara yang dipergunakan adalah HIR dan RBg serta peraturan-peraturan yang diambil dari hukum acara yang ada dalam kitab fiqhi, sedangkan hukum materilnya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan Ijtihad.

Selanjutnya setelah proses dan perjuangan yang panjang, akhirnya dikeluarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan telah banyak menghasilkan perubahan berbagai bidang kehidupan masyarakat,

hukum, dan Badan Peradilan, serta ketatanegaraan. Perubahan signifikan di bidang ketatanegaraan adalah penyatuan atap lembaga peradilan (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung. Reformasi sistem penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) ini diawali ketika amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dimasukkan dalam pasal 24 ayat (2) yaitu: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004. Lahirnya Undang-Undang Kehakiman yang berparadigma baru ini menuntut juga dilakukannya amandemen Undang-Undang masing-masing lingkungan Peradilan termasuk Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009.

1. Kedudukan Peradilan Agama

Tentang kedudukan Peradilan Agama dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yaitu sebagai berikut:

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini.¹

Kekuasaan kehakiman dalam lingkup Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan kehakiman di

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 2, hlm. 5.

lingkungan Peradilan Agama berpuncak di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan negara tertinggi.²

Yang dimaksudkan dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada Pengadilan Agama di Indonesia, dan hanya mereka yang mengakui dirinya pemeluk agama Islam.

Pengadilan Agama atau pengadilan tingkat pertama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten, hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu Kota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.³

Pengadilan Agama Bulukumba sebagai salah satu pelaksanaan kehakiman tingkat pertama dengan tugas pokok dan fungsi mengadili perkara yang telah ditetapkan menjadi kewenangannya berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, selain fungsi mengadili juga mempunyai fungsi membina organisasi, menyelenggarakan administrasi baik kepegawaian maupun keuangan, tugas pokok dan fungsi tersebut menjadi tanggung jawab aparat Pengadilan Agama Sengkang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bulukumba sebagai Badan Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan Agama Bulukumba memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelaksanaan tugas agar lebih berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

2. Susunan Organisasi Pengadilan Agama

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 3, hlm. 5.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 4, hlm. 6.

Susunan organisasi Pengadilan Agama dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yaitu Pengadilan terdiri dari:

- a. Pengadilan Agama, merupakan Pengadilan tingkat pertama.
- b. Pengadilan Tinggi Agama, merupakan Pengadilan tingkat banding.⁴

Makna Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama ialah Pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan dan gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan sebagai Pengadilan tingkat banding.

Dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dijelaskan tentang susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita.⁵ Sedangkan dalam pasal 10 pada Undang-Undang tersebut bahwa pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua, dan seorang wakil ketua.⁶

3. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama

Kompetensi absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 6, hlm. 6.

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 9, hlm. 7.

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 10, hlm. 7.

c. Wakaf dan shadaqah.⁷

Yang dimaksudkan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah:

- a. Izin beristri lebih dari seorang.
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c. Dispensasi kawin.
- d. Pencegahan perkawinan.
- e. Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- f. Pembatalan perkawinan.
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
- h. Cerai talak.
- i. Gugatan perceraian (cerai gugat).
- j. Penyelesaian harta bersama.
- k. Mengenai penguasaan anak-anak.
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- p. Pencabutan kekuasaan wali.
- q. Penunjukan orang lain sebagai seorang wali dicabut.

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 49, h. 21.

- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
- t. Penetapan asal usul anak.
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- v. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁸

Kewenangan tersebut merupakan dasar untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat di Kota Bulukumba. Selain untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian, dan Keuangan).
- c. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah dan daerah hukumnya apabila diminta.
- e. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian,

⁸Data Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2014.

penyebaran informasi hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat dan sebagainya.

- f. Memberikan peningkatan pelayanan masyarakat pencari keadilan melalui website Pengadilan Agama Bulukumba sehingga masyarakat dapat mengakses transparansi Peradilan.⁹

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Agama Sengkang sebagai Badan Kekuasaan Kehakiman, memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelaksanaan tugas agar lebih berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 telah menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan.¹⁰

Perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Bulukumba sebagai lembaga kehakiman yang menyelesaikan perkara tingkat pertama cukup mendapat respon positif dari masyarakat khususnya umat Islam, dimana masyarakat telah mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama, sebagaimana yang terlihat dalam tabel sebagai berikut:

⁹Data Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2014.

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 49, hlm. 21.

Tabel 1

Jumlah perkara yang diterima pada pengadilan Agama Bulukumba dari tahun 2009-2013 yaitu:

TAHUN	PERMOHONAN	GUGATAN	TOTAL
2009	62	637	699
2010	48	678	726
2011	70	840	910
2012	119	954	1.073
2013	145	986	1.131
JUMLAH	444	4.095	4.539

Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2014.

Berdasarkan data tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2009 s/d tahun 2013 volume perkara (perkara permohonan dan gugatan) yang diterima oleh Pengadilan Agama Bulukumba jumlahnya cukup tinggi yaitu total seluruhnya 4.539 yang terdiri atas 444 perkara permohonan (*Volunter*) yang meliputi itsbat nikah, dispensasi nikah, dan wali adhal. Dan perkara gugatan (*Contentiosa*) sebanyak 4.095 yang meliputi perkara perceraian, poligami, harta bersama, dan warisan. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat khususnya umat Islam dalam menyelesaikan perkaranya melalui jalur hukum yakni melalui Pengadilan Agama serta dapat membuktikan bahwa Pengadilan Agama dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Dalam menyelesaikan masalah rumah tangga sudah lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia guna mendapat keadilan dan kepastian hukum.

Untuk menerapkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal Poligami berpedoman pada hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang memuat himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis sebagai hukum terapan, dikenal dengan istilah fiqhi Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, salah satu sumber hukum Islam bagi masyarakat muslim Indonesia menjadi pedoman hukum materil dan formil bagi Pengadilan Agama dalam mengadili dan menyelesaikan perkara Poligami.

Perkara Poligami yang dimaksud seperti yang diajukan pada Pengadilan Agama Bulukumba, yang terlihat dan yang terdata dan tabel satu yaitu sebanyak 100% perkara yang masuk di tahun 2009-2013 hanya 9 perkara Poligami dengan presentase 0,0001 % perkara Poligami yang di perkarakan dalam Pengadilan Agama Bulukumba, hal ini membuktikan bahwa perkara Poligami cukup sedikit dibandingkan perkara perkara lain di Pengadilan Agama Bulukumba.

B. Latar Belakang Poligami Dan Faktor Penyebab Poligami

Pekawinan dalam keluarga tidak selamanya mengalami keharmonisan kedala-kendala yang ada dalam keluarga, Apalagi dengan kendala urusan Urgan dalam keluarga, inilah yang menyebabkan suami biasanya melakukan poligami apalagi didorong dengan latar belakang sebagai berikut:

1. Jumlah wanita melebihi jumlah laki-laki.

Pada saat itulah poligami menjadi sebuah solusi untuk mengatasi masalah wanita yang belum bisa menikah, yaitu untuk mencegah dampak

negatif yang mungkin muncul karena banyaknya wanita yang hidup tanpa menikah. Poligami juga bisa menjadi formula untuk mengatasi banyaknya kasus penculikan terhadap kaum wanita oleh kaum laki-laki ketika jumlah laki-laki sangat minim. Karena kasus penculikan ini maka bisa menyebabkan dan menimbulkan keresahan serta kegoncangan bagi keluarga.¹¹

2. Nafsu biologis laki-laki sangat besar, yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh satu orang istri, atau istrinya sendiri memang sedang tidak ingin memenuhi kebutuhan biologisnya. Agar tidak terjadi penyimpangan dan terjerumus ke dalam perbuatan zina, saat itulah poligami bisa menjadi pengganti. Atau apabila istri memang sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis suaminya. Maka saat itu poligami bisa menjadi pengganti dari talak (perceraian).¹²
3. Masa kesuburan laki-laki bisa berlangsung sampai 70 hari tahun atau lebih, sementara kesuburan pada wanita umumnya hanya sampai umur 50 tahun atau lebih. Itulah ketetapan Allah Terhadap kaum wanita dan laki-laki. Bila kemakmuran bumi ini tergantung selamanya pada banyaknya manusia, maka menyia nyiakan masa-masa subur selama 20 tahun bagi kaum laki-laki. Tersebut bisa menjadi kendala untuk memakmurkan bumi ini, Maka poligami bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan catatan

¹¹Drs. H. Hudrin Husain (53 Tahun), Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba 17 Oktober 2014.

¹²Drs. H. Hudrin Husain (53 Tahun), Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba 17 Oktober 2014.

tetap memegang prinsip bahwa proses kelahiran seseorang sesungguhnya identik dengan lahirnya kemampuan produktivitas manusia.¹³

4. Poligami juga melahirkan perilaku pengayoman bagi anak-anak yatim yang berada dalam tanggungan seorang ibu yang kurang mampu. Sedangkan orang yang melakukan mengurus dan memelihara anak yatim sesungguhnya ingin meraih persahabatan dengan Rasulullah SAW di surga sebagaimana yang terdapat dalam banyak hadis.¹⁴

Hal tersebut di atas Sama dengan hal yang di ucapkan oleh Bapak Ketua Pengadilan agama, Bahwa paktor penyebab Biasanya Pemohon Poligami, Memasukkan Permohonan poligami, disebabkan karena adanya ketidak harmonisan dalam keluarga utamanya ketidak sanggupuan istri memberikan kebutuhan biologis terhadap suami, dan karena memang dari garis keturunan dan pendidikan juga mempengaruhi seorang suami melakukan Poligami misalnya, kondisi keluarga memang sudah turun temurun melakukan ouligami, dan yang kedua pendidikan mengenai ajaran islam tentang di perbolehkannya melakukan poligami, hal-hal inilah yang menjadi latarbelakang seseorang melakukan poiligami.

Adapun pertimbangan hukum, hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam memberikan izin poligami adalah bahwa permohonan pemohon untuk melakukan poligami sekurang-kurangnya ada dua unsur atau pilar hukum yang harus dipenuhi, yaitu :

¹³Drs. H. Hudrin Husain (53 Tahun), Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba 17 Oktober 2014.

¹⁴Sutikno, S.Ag, MH. Hakim Pengadilan Agama Bulukuba, *Wawancara*, Pengadilan Agama Bulukumba 17 Oktober 2014.

1. Hubungan hukum antara Pemohon, Termohon dan Calon istri Pemohon.
2. Adanya alasan atau syarat untuk poligami.

Pada unsur hukum yang pertama yaitu hubungan hukum antara Pemohon, Termohon dan Calon istri Pemohon. Berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan Calon Istri pemohon dan orang tua Calon istri Pemohon. berdasarkan keterangan pemohon, termohon dan calon istri pemohon dan orang tua calon istri pemohon yang dikaitkan dengan keterangan saksi, telah terbukti antara termohon, pemohon dan calon istri pemohon adalah orang lain, tidak mempunyai hubungan darah (Mahram), tidak saudara sesusuan. Adapun pertimbangan hukum tentang termohon mengizinkan pemohon untuk menikah lagi (Poligami) adalah sebagai berikut :

Termohon telah mengenal calon istri pemohon dengan cukup baik, (wanita Yang akan dinikahi) sehingga pemohon dengan yakin meminta persetujuan dari Termohon untuk diizinkan menikah lagi dengan calon istri pemohonan, maka syarat adanya persetujuan istri sebagaimana pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa diberlakukan secara mutlak. Oleh karena itu harus dipenuhi unsur hukum yang kedua yaitu adanya alasan atau syarat untuk poligami, dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Al-Qur'an sebagai dasar hukum utama dalam Islam tidak menyebutkan adanya beberapa alasan untuk berpoligami, sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, kecuali syarat untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya sebagaimana dalam QS An-Nisa'/4:3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَّثَ
وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat dengan kepada tidak berbuat aniaya”¹⁵

- b. Bahwa syarat adanya jaminan suami akan berlaku adil dalam Islam telah tercantum dalam pasal 5 ayat 1c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahkan lebih ditegaskan lagi dalam pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya menjadi syarat utama.
- c. Bahwa untuk menyeleraskan konsep hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak tidak hanya sebagai syarat utama akan tetapi sekaligus menjadi salah satu alasan untuk melakukan poligami, yang bunyi lengkapnya Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan untuk beristri lebih dari orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan.”

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 376.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya diatas maka suami mengajukan poligami ke Pengadilan Agama Bulukumba.

Dalam kasus ini alat bukti yang dijadikan majelis hakim untuk meyakinkan dalam putusannya adalah :

1. Surat keterangan pernah menikah atas nama Pemohon dan Termohon.
2. Pengakuan dari Pemohon dan Termohon.
3. Keterangan saksi-saksi Pemohon yang tidak berlawanan.

Alat bukti yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan kasus ini adalah pengakuan dari termohon. Alat bukti ini dijelaskan dalam hukum acara perdata dalam pasal 164 HIR yang berbunyi :

- a. Bukti tertulis, (KUHPerd. 1867 dst.; IR. 165, 168; S. 1867-29.)
- b. Bukti saksi, (KUHPerd. 1895; IR. 168 dst.)
- c. Persangkaan, (KUHPerd. 1915; IR. 173.)
- d. Pengakuan, (KUHPerd. 1923 dst.; IR. 174 dst.)
- e. Sumpah, (KUHPerd. 1929 dst.; IR. 155 dst., 177, 381.) semuanya dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan dalam pasal-pasal berikut.

Dan dalam hukum Islam alat bukti pengakuan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

Jadi Pengadilan Agama Bulukumba dalam hal pemeriksaan di depan muka persidangan, Pengadilan Agama Bulukumba juga memerlukan adanya

pembuktian, untuk memperkuat dan memperjelas akan suatu perkara yang sedang diperiksa dan upaya dengan bukti-bukti tersebut hakim dapat memberikan keputusan sesuai dengan norma hukum baik itu undang-undang maupun hukum islam.

Dengan demikian tujuan pelaksanaan poligami menurut Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa kedua aturan hukum tersebut sama-sama menghendaki rumah tangga yang tentram dan kekal untuk selama-lamanya. Disamping penekanan pelaksanaan poligami merupakan satu perkecualian yang hanya diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang betul-betul memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi, jadi tidak semua laki-laki boleh melakukan poligami.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Bulukumba pada perkara Poligami dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Maka telah sesuai dan tepat dengan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama.

Bahwa menurut pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bilamana seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang harus ada alasan diantaranya :

1. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Bahwa alasan-alasan sebagaimana yang diketengahkan oleh pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan alasan yang bersifat 12 alternatif, artinya apabila seorang suami hanya mempunyai satu alasan diantara ketiga alasan tersebut diatas, maka alasan tersebut dapat diterima.

Bahwa selain alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga ada persyaratan-persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Adanya persetujuan istri atau istri-istri mereka secara tertulis dan bisa dinyatakan secara lisan didepan sidang pengadilan, untuk menghindari dari pemalsuan surat persetujuan apabila persetujuan tersebut tertulis, maka sebaiknya mendengarkan langsung dari istri di depan sidang.

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka secara tertulis.

Dalam menentukan ukuran mengenai jaminan keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, maka majelis hakim dapat melihat dan mengetahui jumlah kekayaan dengan didasarkan pada surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara yang diketahui oleh pimpinan tempat suami bekerja atau yang dibuat oleh suami yang diketahui kepala desa suami bertempat tinggal atau dapat dilihat dari surat keterangan pajak penghasilan atau surat-surat keterangan yang lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Jadi kepastian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah suatu penilaian hakim berdasarkan kekayaan yang ada pada pemohon pada saat pemohon diajukan, bukan kepastian yang bersifat mutlak.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka secara tertulis.¹⁶

Untuk menentukannya adanya jaminan atau tidak dari suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka adalah hal yang sulit, maka yang dapat dilakukan hakim adalah meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami akan mengaku berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dan apabila suami menyalahi pernyataan jaminan tersebut, maka istri dapat menuntut keadilan pada pengadilan.

¹⁶ Data Pengadilan Agama Bulukuba, *Pedoman Memutuskan Perkara Poligami*, 17 Oktober 2014.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan sebagaimana di dalam pasal 57 dengan menggunakan syarat-syarat tertentu yaitu Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Dan sebagai lembaga yang berkompetensi dalam masalah ini adalah Pengadilan Agama.

C. Dampak Poligami Bagi Kehidupan Keluarga

Poligami yang di lakukan pastinya akan berdampak pad keluarga poligami seperti yang terjadi pada keluarga Poligami di kabupaten bulukumba yang tidak ingin disebutkan namanya. Poligami adalah salah satu jalan dalam islam untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan terjadi pada kehidupan keluarga. Misalnya persinahan yang di lakukan oleh suami, yang sudah tidak lagi diberikan kebutuhan biologis oleh istrinya. Dan hal-hal lain yang dapat merujuk pada perceraian.

Dampak Poligami bagi keluarga yaitu: Dampak Positif Poligami Menurut pengakuan salah satu korban poligami dalam perkara di Pengadilan Agama Bulukumba.¹⁷

¹⁷ Data Pengadilan Agama Bulukuba, 17 Oktober 2014.

Wawan cara kepada hakim dan data hasil mediasi perkara-perkara di dalam pengadilan agama bulukumba mendapatka informasi mengenai dampak positif poligami bagi kehidupan keluarga, adapun dampak positifnya iyalah, dalam gambaran Umum Yaitu:

1. Terhindar dari maksiat dan sina.
2. Memperbanyak keturunan.
3. Kebutuhan seksual(biologis) Suaminya terselesaikan ketika istri terdahulu tdk mampu untuk memberikan kebutuhan pada suaminya.
4. Istri terpacu melakukan hal yang baik kepada suaminya karena ada yang alain.
5. Melatih kesabaran dalam menghadapi keluarga dan terhindar dari rasa egois yang berlenihan¹⁸

Dampak Poligami bagi keluarga yaitu: Dampak Poligami Menurut pengakuan salah satu korban poligami dalam perkara di Pengadilan Agama Bulukumba.¹⁹

1. Dampak secara psikologis (perasaan)

Menurut pengakuannya bahwa perasaan yang dirasakan dan menyalahkan diri karena merasa tidakan yang dilakukan oleh suaminya, itu disebabkan karena ketidak mampunya melaksanakan tugasnya sebagai istri yaitu memenuhi kebutuhan biologis suami yang mengakibatkan Suaminya melakukan poligami.

2. Dampak secara ekonomi

¹⁸ Hakim Pengadilan Agama Bulukuba, Wawancara, Kantor Pengadilan Agama Bulukumba 17 Oktober 2014.

¹⁹ Sitti Ardina (42 Tahun) Korban Poligami, Wawancara, Pengadilan Agama Bulukuba, 17 Oktober 2014.

Faktor ekonomi juga menjadi kendala karena ketergantungan dalam wilayah ekonomi apa lg memang dalam kehidupan keluarga hanya suami yang mencari nafka, menurut pengakuannya, tidak bisa iya pungkiri bahwa terkadang suami lebih memperlakukan istri muda di bandingkan istrinya yang terdahulu, walaupun sudah ada pengakuan akan berlaku adil didalam keluarga.

3. Keharmonisan dalam Keluarga

Timbulnya rasa dengki kepada dan terjadinya permusuhan antara istri baru dan yang terdahulu karena di dasari suami biasanya lebih perhatian dengan istri baru, dan perasaan seperti itu biasanya juga terwaris kepada anak-anak masing-masing istri.²⁰



²⁰ Sitti Ardina (42 Tahun) Korban Poligami, Wawancara, Pengadilan Agama Bulukuba, 17 Oktober 2014.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Latar belakang seseorang melakukan poligami di Pengadilan Agama Bulukumba diataranya di pengaruhi oleh banyaknya jumlah wanita, garis keturunannya kebanyakan melakukan Poligami yang menjadi referensi seseorang untuk melakukan Poligami, dan kondisi rumah tangga pelaku poligami yang singkron dengan faktor penyebab Poligami.
2. Faktor penyebab suami beristri lebih dari seorang karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. dampak yang urgen terhadap kehidupan keluarga yang diantaranya tidak harmonisnya hubungan berkeluarga walaupun juga membuat seseorang menjadi sosok yang tegar dan sabar dalam menghadapi masalah.

B. SARAN

1. Penelitian ini hendaknya dapat menjadi motivasi bagi instansi yang terkait untuk lebih meningkatkan pelayanan secara professional terhadap orang islam yang mengajukan izin poligami.
2. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban yang berlaku terutama hukum islam sehingga tercapailah masyarakat yang sadar akan kepentingan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Arto, A. Mukti. *Urgensi dan Fungsi Administrasi Peradilan*. Disampaikan pada Sosialisasi bimbingan Teknis Administrasi Peradilan oleh Dijten Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, 8 April 2009.
- Asmar, Lanka. "Implementasi Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA) dalam putusan hakim Pengadilan Agama", Kompasiana, 31 Agustus 2012. <http://hukum.kompasiana.com/2012/08/31/implementasi-sistem-administrasi-perkara-pengadilan-agama-siadpa-dalam-putusan-hakim-pengadilan-agama-483385.html> (16 juni 2014)
- Berdiyana. *Implementasi sistem administrasi Perkara*, Dapat di akses di (<http://hukum.kompasiana.com/2012/08/31/implementasi-sistem-administrasi-perkara-pengadilan-agama-siadpa-dalam-putusan-hakim-pengadilan-agama-483385.html>), (02 Februari 2014).
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Islam Dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Rosda, 1997.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Gassing, Qadir dan Wahyuddin Halim, ed. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Skripsi, tesis dan Disertasi) Cet.II*; Makassar: Alauddin Press, 2009.
- Halim, Abdul. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Hamid, Andi Tahir. *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Jayadi, Ahkam., *Aspek Religius Penegak Hukum*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Koto, Alauddin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Kerja Hakim, Panitera, dan Jurusita sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar*. Makassar: PTA Makassar, 2010.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana: Jakarta: Kencana, 2008.
- Mansyur , Ridwan. *implementasi sipp/cts dan siadpa berbasis it "menyambut matahari terbit di januari 2014. 5 januari 2013*, <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=3480>. (16 juni 2014).
- Mapuna, Daeng Hadi. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Nugraha, G Setia, *Kamus Bahasa Indonesia* . Surabaya: Sulita Jaya, 2013.

- Rasyid , Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, sekretariat Negara, Jakarta*.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Akasara 2004,.
Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, yogyakarta:liberty 1989.
- Supardin. *Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press 2002 M,.
- Tim Edukasi HTS, *Modul Sosiologi XII untuk SMA/MA*. Surakarta: CV Hayati Tumbuh Subur, 2010.
- Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher, 2008.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial. Cet V*; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Utami, Wiwik. *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Era Globalisasi, 4 Juni 2012*, www.kompasteknologi.com (16 Juni 2014)
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.